

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam UUD 1945 pasal 18, dijelaskan tentang pemerintahan daerah Republik Indonesia, sebagai berikut :¹

"Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheid sstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat sstaat juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale-rechtsgemeen, schappen) atau bersifat daerah administrasi belaka. Semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan".

Negara Republik Indonesia dalam hal ketata negaraan-nya menganut Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi. Dalam sistem ini pemerintah pusat tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, sebagian kekuasaan negara diberikan kepada daerah-daerah, dengan tujuan agar daerah-daerah dapat ikut menentukan dan bertanggung jawab mengenai daerahnya sendiri, dengan demikian pemerintah

1) Undang-Undang Dasar 1945, mengenai pemerintahan daerah



pusat hanya menentukan urusan yang bersifat penting dan umum, antara lain : urusan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, keuangan, pos dan lain-lain. Urusan yang menjadi kepentingan daerah dapat diatur oleh daerah sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-an pemerintah pusat. Daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri disebut daerah otonom.

Keuntungan sistem Desentralisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Rakyat di daerah berkesempatan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian sistem ini lebih demokratis.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah selalu dapat disesuaikan dengan keadaan daerah, baik secara geografis maupun sosial budaya.

Pemerintahan Pembantu Bupati Batur terbentuk disebabkan oleh perkembangan dan pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara Daerah Tingkat II. Demikian juga Pemerintahan Pembantu Bupati Batur terbentuk karena daerah distrik Batur berkembang dengan pesat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan industri dan perdagangan yang ada. Selain itu dengan perkembangan daerah distrik Batur diiringi dengan bertambahnya penduduk, baik penambahan penduduk dari imigran maupun penambahan penduduk dari kelahiran. Kenyataan ini

membutuhkan suatu wadah pemerintah daerah untuk mengatur daerah tersebut sesuai dengan kondisi daerah. Dengan kondisi demikian maka dibangun suatu wadah pemerintahan yaitu kantor Pembantu Bupati Batur.

Kantor Pembantu Bupati Batur pada saat ini bila ditinjau secara kuantitatif (menyangkut macam ruang, besaran dan tata ruangnya) maupun secara kualitatif (meliputi efek psikologis, süssana ruang dan persyaratan ruangnya), masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna atau memenuhi syarat sehingga perlu dibuat suatu perencanaan dan perancangan kantor Pembantu Bupati yang memenuhi persyaratan kuantitatif dan kualitatif, yang kehadirannya bisa menunjukkan eksistensi keberadaan kantor Pembantu Bupati sesuai dengan karakteristik fungsi yang diembannya.

Kantor Pembantu Bupati meliputi kegiatan kordinasi, pengawasan dan pembinaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilingkupinya.

Kantor Pembantu Bupati sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat yang didalamnya terkait fungsi kordinasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dituntut dalam kemudahan pencapaian (dalam arti kedekatan, pemerataan dan kejelasan pencapaian oleh masyarakat yang dilayani) serta kedekatan hubungan dengan area fungsional atau institusional lain.

Dengan menata kembali bangunan kantor Pembantu

Bupati Batur yang lama, maka diharapkan kantor Pembantu Bupati tersebut lebih berfungsi keberadaannya dan dapat menampung semua tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga Pembangunan Nasional yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud.

Suatu bangunan perkantoran Pembantu Bupati membutuhkan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja yaitu salah satunya mengenai pola penataan ruang untuk kegiatan bekerja. Oleh karena itu dalam perencanaan dan perancangan bangunan perkantoran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bentuk bangunan disesuaikan dengan fungsi kegiatan.
2. Estetika.
3. Keamanan.
4. Kenyamanan.
5. Keharmonisan.

Pelaksanaan pembangunan suatu gedung perkantoran harus sudah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat memiliki nilai-nilai arsitektural dan nilai estetika, yang akan ditampilkan pada suatu ruangan, dengan demikian kualitas ruang didalam bangunan akan tercapai.

1.2 PERMASALAHAN

Dari uraian yang tertera didalam latar belakang maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana menempatkan suatu bangunan perkantoran yang memudahkan dalam pencapaian, sesuai dengan fungsi sebagai abdi dan pelayanan bagi masyarakat.
2. Bagaimana pola penataan ruang didalam bangunan yang dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai kantor Pembantu Bupati.
3. Bagaimana ungkapan fisik bangunan yang berkarakter bangunan perkantoran dan bercitrakan tradisional sehingga memberi kewibawaan sebagai kantor Pembantu Bupati.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran dari proposal ini adalah :

a. TUJUAN

Perencanaan dan perancangan pembangunan kantor Pembantu Bupati Batur yang dapat meningkatkan segala aktifitas yang ada dan menciptakan suatu bentuk bangunan perkantoran yang dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan permasalahan di muka.

b. SASARAN

Terciptanya suatu konsep dasar perencanaan dan perancangan kantor Pembantu Bupati, yang dapat ditransformasikan kedalam desain arsitektur dan memenuhi persyaratan dari fungsi bangunan kantor pemerintahan yang bercitrakan tradisional.

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN

1. Pembahasan memfokuskan pada bangunan kantor Pembantu Bupati yang sesuai dengan penekanan permasalahannya.
2. Pembahasan dibatasi pada bidang arsitektur sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai.
3. Analisa permasalahan yang utama lebih memfokuskan pada bangunan kantor Pembantu Bupati Batur, sedang untuk hal yang tidak banyak mendukung analisa dibahas tidak secara mendetail.

1.5 METODE PEMBAHASAN

Metode pembahasan yang digunakan adalah metode induktif yaitu dimulai dari permasalahan utama menuju pada permasalahan khusus atau dengan mengidentifisir unsur-unsur permasalahan yang ada pada bangunan perkantoran untuk mendapatkan pemecahan yang bersifat arsitektural.

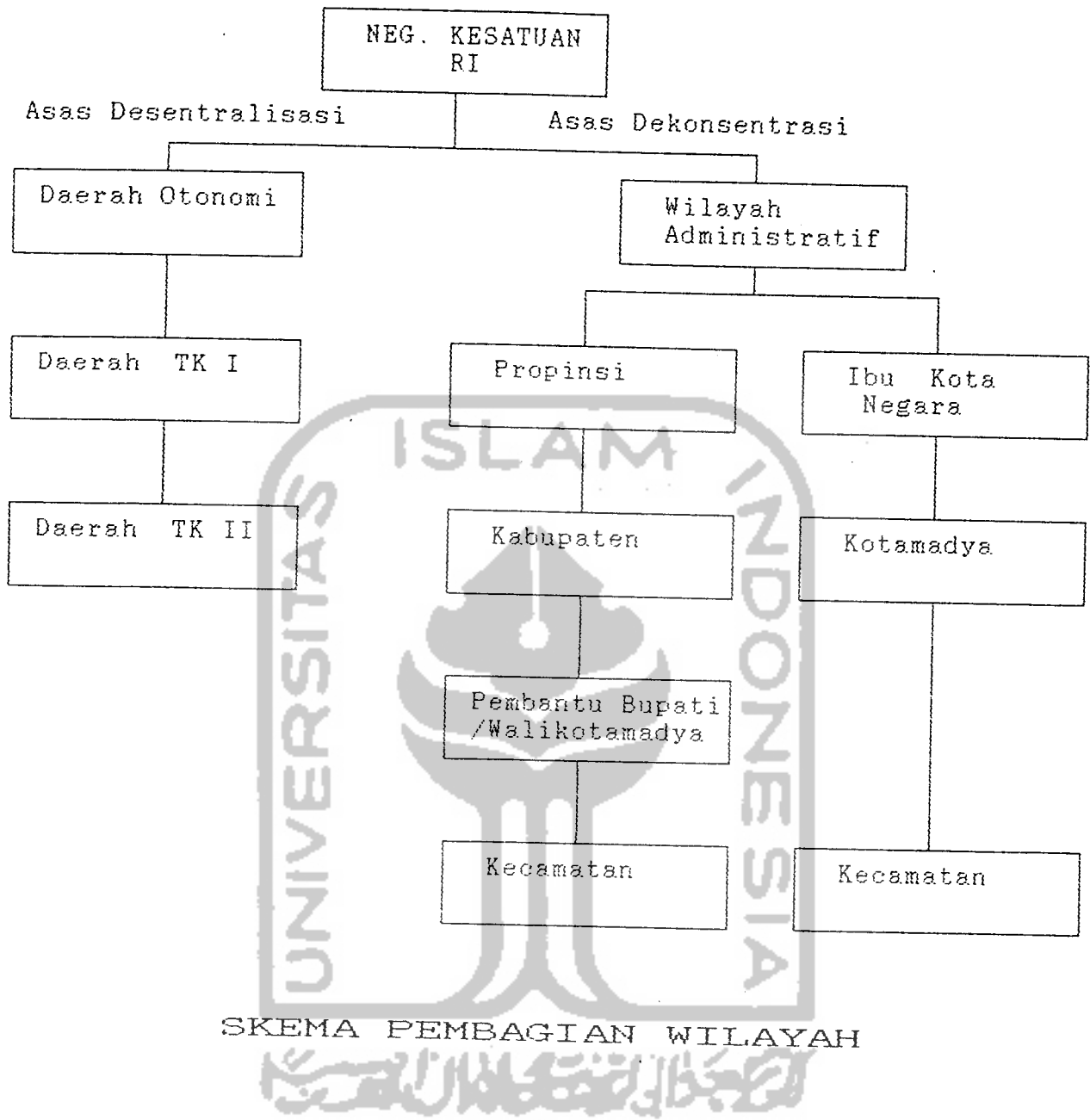
1.6 SISTEMATIKA

- BAB I : Pendahuluan : latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika.
- BAB II : Tinjauan Umum : tinajauan pemerintahan Pembantu Bupati, kelembagaan pemerintah Pembantu Bupati, masyarakat sebagai unsur yang dilaya-

ni.

- BAB III : Tinjauan Situasi Kantor Pembantu Bupati Di Batur : diskrip wilsyah, perkembangan wilayah di Batur, ungkapan bentuk arsitektur lokal, kondisi kantor Pembantu Bupati.
- BAB IV : Kantor Pembantu Bupati : unit-unit kerja dan tugasnya, perangkat kerja kantor Pembantu Bupati, program kegiatan, tuntutan pewardahan kantor Pembantu Bupati.
- BAB V : Analisa : menganalisa dan sintesa mengenai pembangunan kantor Pembantu Bupati Batur.
- BAB VI : Kesimpulan
- BAB VII : Konsep Dasar Perencanaan Dan Perancangan.





SKEMA PEMBAGIAN WILAYAH

SKEMA : I

SUMBER : UU NO. 5 TAHUN 1974

TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN,
KANTOR PEMBANTU BUPATI .